

Penerbitan Izin Kapal Perikanan di Bawah 5 Gross Tonage (GT) Melalui Aplikasi SIMKADA di Dinas Perikanan Kota Baubau

Issuance of a Fisheries Vessel License Under 5 Gross Tonage (GT) by SIMKADA at the Fisheries Office of the City of Baubau

¹Rizki Mustika Suhartono, ²Rahmawansyah Badawie, ³L. M. Ricard Zeldi Putra, ⁴Eko Satria, ⁵Al Hiday Nur

¹ Fakultas Hukum/Universitas Muhammadiyah Buton, Email: rizkimustika44@gmail.com

² Fakultas Hukum/Universitas Muhammadiyah Buton

³ Fakultas Hukum/Universitas Muhammadiyah Buton, Email: ricardzeldiputra@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum/Universitas Muhammadiyah Buton, Email: kizsatria@gmail.com

⁵ Fakultas Hukum/Universitas Muhammadiyah Buton

ABSTRAK

Penerbitan Izin Kapal Perikanan Dibawah 5 Gt melalui Sistem Informasi Izin Kapal Daerah Di Dinas Perikanan Kota Baubau. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Teknik pengumpulan datanya meliputi: untuk data primer melalui wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan untuk data sekunder melalui penelusuran terhadap peraturan daerah dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Jumlah responden adalah 11 orang terdiri dari Kepala Dinas Perikanan, Kepala Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI, Kepala Seksi Perizinan Usaha Perikanan, Staf Perizinan Usaha Perikanan, dan Masyarakat yang memiliki Kapal Perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerbitan Izin Kapal Perikanan Dibawah 5 Gt melalui Sistem Informasi Izin Kapal Daerah di Dinas Perikanan Kota Baubau yaitu a.) Pas Kecil merupakan Tanda Kebangsaan Kapal yang wajib dimiliki oleh nelayan yang mempunyai kapal dibawah 5 Gross Tonage (GT) yang merupakan wewenang Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Baubau dalam penerbitannya. b.) Bukti Pencatatan Kapal Perikanan dibawah 5 Gross Tonage (GT) melalui aplikasi SIMKADA pada Seksi Perizinan Usaha Perikanan. Namun belum optimal ditunjukkan dengan tingkat kesadaran masyarakat nelayan/pemilik kapal daerah dalam pengurusan dokumen kapal perikanan dibawah 5 Gross Tonage (GT) secara mandiri masih sangat rendah yang memiliki tingkat persentase sebesar 2 %.

Kata Kunci: Penerbitan, SIMKADA, Dinas Perikanan Baubau

ABSTRACT

Issuance of Fishing Vessel Permits Under 5 Gt through the Regional Vessel Permit Information System in the Baubau City Fisheries Service. This research is an empirical (sociological) legal research. Data collection techniques include: for primary data through interviews and field observations. As for secondary data through searching of local regulations and books that are relevant to this research. The number of respondents was 11 people consisting of the Head of the Fisheries Service, the Head of TPI Licensing and Management, the Head of the Fisheries Business Licensing Section, the Fisheries Business Licensing Staff, and the people who owned the Fishing Vessels. The results showed that the Issuance of Fishing Vessels Permit Under 5 Gt through the Regional Vessel Permit Information System in the City of Baubau Fisheries Service, namely a.) Small Pas is a Nationality Sign of the Ship that must be owned by

fishermen who have vessels under 5 Gross Tonage (GT) which is the authority Baubau Class I Port Operator Unit Office in its publication. b.) Evidence of Registration of Fishing Vessels under 5 Gross Tonage (GT) through SIMKADA application in the Fisheries Business Licensing Section. However, it has not been optimally shown by the level of awareness of the community of fishermen / boat owners in the handling of fishing boat documents under 5 Gross Tonage (GT) independently is still very low which has a percentage level of 2%.

Keywords: *Issuance, SIMKADA, City of Baubau Fisheries Service*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia berdasarkan gambaran geografisnya merupakan Negara kepulauan dengan laut sebagai penghubung utamanya. Potensi perairan serta perikanan Indonesia secara ekonomis begitu berpotensi, kurang lebih 75 persen wilayah Indonesia merupakan laut dengan lebih dari 17.000 pulau. Dominan masyarakatnya mendiami kawasan-kawasan pesisir atau tepi pantai. Oleh karena itu sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian dengan memanfaatkan hasil-hasil laut Indonesia yang melimpah ruah.

Sektor kelautan dan perikanan di Indonesia merupakan salah satu sektor Produk Domestik Bruto (PDRB), didalamnya tentang ketahanan pangan, keragaman hayati dan penyediaan lapangan kerja yang saling bertautan satu-sama lain. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.26 Tahun 2013 pasal 4 bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan laporan SIUP, SIPI/ SIKPI dan BPKP yang diterbitkannya kepada pemerintah pusat dalam hal ini kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan yang disampaikan selama ini masih bersifat manual dalam bentuk berkas dengan format tabel yang tidak seragam, sehingga menyulitkan untuk mengetahui jumlah kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 Gross Tonage (GT) yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Permasalahan tersebut disebabkan karena belum terciptanya sistem dan database yang terintegrasi yang dikelola secara nasional. Untuk itu, Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Tahun Anggaran 2015 telah menginisiasi Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA). Untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam menerbitkan izin kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 Gross Tonage (GT) maka perlu disusun pedoman SIMKADA.

Pedoman penerbitan izin kapal perikanan melalui aplikasi SIMKADA (Sistem Informasi Izin Kapal Daerah) dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 Gross Tonage (GT) sesuai kewenangannya, sehingga terwujud harmonisasi dan integrasi perizinan pusat dan daerah.

Salah satu realisasi terlaksananya kegiatan di seksi perizinan usaha perikanan adalah perihal izin kapal perikanan tangkap, dalam hal ini kapal-kapal yang berukuran di bawah 5 (lima) Gross Tonage (GT) izin perikanannya di keluarkan oleh Dinas Perikanan Kota Baubau melalui Seksi Perizinan Usaha Perikanan. Izin perikanan yang dimaksud merupakan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) melalui aplikasi Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA) yang terkoneksi dengan Pemerintah Pusat.

B. Tinjauan Pustaka

Penerbitan izin kapal perikanan dengan ukuran dibawah 5 Gross Tonage sampai dengan 30 Gross Tonage diatur sesuai dengan Peraturan Daerah setiap Provinsi/Kabupaten/Kota dan mengacu pada peraturan perundang-undangan pada bidang usaha perikanan tangkap. Pemerintah daerah dalam penerbitan SIUP, SIPI, SIKPI, SIPI Andon dan BPKP harus mempertimbangkan estimasi potensi dan jumlah tangkapan sumberdaya ikan yang diperbolehkan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sistem informasi adalah rangkaian komponen berupa data, prosedur, manusia, dan teknologi yang digunakan untuk melakukan sebuah proses dalam pengambilan keputusan guna meujang keberhasilan bagi tiap organisasi (dalam pencapaian tujuan).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk menggambarkan dan menganalisis Penerbitan Izin Kapal Perikanan di bawah 5 Gross Tonage (GT) melalui Sistem Informasi Izin Kapal Daerah di Dinas Perikanan Kota Baubau.

D. Analisis Masalah

Analisis masalah adalah kajian sementara untuk mengetahui penyebab timbulnya masalah,serta alternatif pemecahan masalah penerbitan izin kapal. Berdasarkan tujuan masalah,sesuai dengan pengertian analisis masalah dapat yang dapat di simpulkan adalah belum terciptanya sistem dan database yang terintegrasi yang dikelola secara nasional. Untuk itu, Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Tahun Anggaran 2015 telah menginisiasi Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA). Untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam menerbitkan izin kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 Gross Tonage (GT) maka perlu disusun pedoman SIMKADA.

METODE

A. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti : sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tataran ilmu hukum dogmatik.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian adalah mengkaji tentang bagaimana pemerintah daerah dalam menerbitkan izin kapal perikanan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Sistem Informasi Izin Kapal daerah (SIMKADA).

C. Definisi Operasional Variabel

Penerbitan izin kapal perikanan adalah penerbitan surat izin bagi setiap kapal penangkap ikan berdasarkan dengan kapasitas yang dimilikinya dalam aktifitas menangkap ikan, menyimpan, menampung, mengawetkan, dan mendinginkan. SIMKADA merupakan solusi

yang dibuat sebagai basis penting penentu kebijakan perizinan dan pengelolaan sumber daya ikan sehingga mempermudah masyarakat yang akan mengakses data terkait ikan maupun kapal.

D. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perikanan Kota Baubau pada Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI, Seksi Perizinan Usaha Perikanan, dengan fokus pengamatan kemampuan personil aparatur bidang perizinan usaha perikanan yang bertugas pada penerbitan izin kapal perikanan melalui sistem informasi kapal daerah (simkada) terhadap kapal perikanan.

E. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi merupakan “keseluruhan dari subjek penelitian. Yang meliputi penyelenggara proses penerbitan izin kapal perikanan melalui SIMKADA, antara lain: Kepala Dinas Perikanan, Kepala Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI, Kepala Seksi Perizinan Usaha Perikanan , Staf Perizinan Usaha Perikanan, dan Masyarakat yang memiliki Kapal Perikanan.

2) Sampel

Adapun sampel berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:

- a. Kepala Dinas Perikanan (1 orang)
- b. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Baubau (1 orang)
- c. Kepala Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI (1 orang)
- d. Kepala seksi Perizinan Usaha Perikanan (1 orang)
- e. Staf Bidang Perizinan Usaha Perikanan (1 orang)
- f. Masyarakat pemilik kapal di bawah 5 GT (Gross Tonage) (6 orang)

F. Bahan dan Alat Utama

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian adalah Hasil Validasi Data Kapal Nelayan Perkelurahan dari Dinas Perikanan Kota Baubau. Peralatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat laptop, perangkat lunak Microsoft Excel, dan alat perekam.

G. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu :

1. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*): Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Metode Penelitian Pustaka (*Library Research*): Teknik pengumpulan data meliputi dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, buku-buku serta lain sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Data yang ada pada hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif, agar penelitian ini tidak hanya menggambarkan data-data

semata, tetapi juga mengungkapkan realitas mengenai penerbitan izin kapal perikanan melalui sistem informasi kapal daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerbitan izin kapal Perikanan dibawah 5 Gross Tonage (GT) melalui sistem informasi izin kapal daerah di Dinas Perikanan Kota Baubau yaitu melalui Surat Ukur / Pas Kecil dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Baubau dan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) dibawah 5 Gross Tonage (GT) melalui Aplikasi di seksi Perizinan Usaha Perikanan Dinas Perikanan Kota Baubau.

A. Surat Ukur/ Pas Kecil di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Baubau

Pas Kecil merupakan Tanda Kebangsaan Kapal yang wajib dimiliki oleh nelayan yang mempunyai kapal dibawah 5 Gross Tonage (GT) yang diperkuat didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2). Kewenangan Penerbitan Pas Kecil Kapal Perikanan merupakan Kewenangan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Baubau.

Masih kurangnya sosialisasi pada masyarakat nelayan tentang pentingnya Pas Kecil namun bila ada undangan dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Terkait tentang Sosialisasi tentang Dokumen Perizinan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Baubau turut memberikan pemahaman pada masyarakat pemilik Kapal. Sebelum menerbitkan Pas Kecil Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Baubau melakukan Pengukuran Kapal.

B. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) dibawah 5 Gross Tonage melalui Aplikasi di Seksi Perizinan Usaha Perikanan

Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) adalah dokumen perizinan yang wajib dimiliki nelayan yang mempunyai kapal perikanan dibawah 5 Gross Tonage (GT) yang termuat dalam Permen KP No.30 No PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan jo Permen KP No. 26 Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal perikanan (BPKP). Diperoleh hasil penelitian sebagai berikut diantaranya yaitu untuk sampel penelitian pertama, peneliti melakukan wawancara terhadap 6 (enam) orang responden yang merupakan nelayan atau pemilik Kapal di bawah 5 GT (Gross Tonage) di Kota Baubau yang berasal dari beberapa Kelurahan.

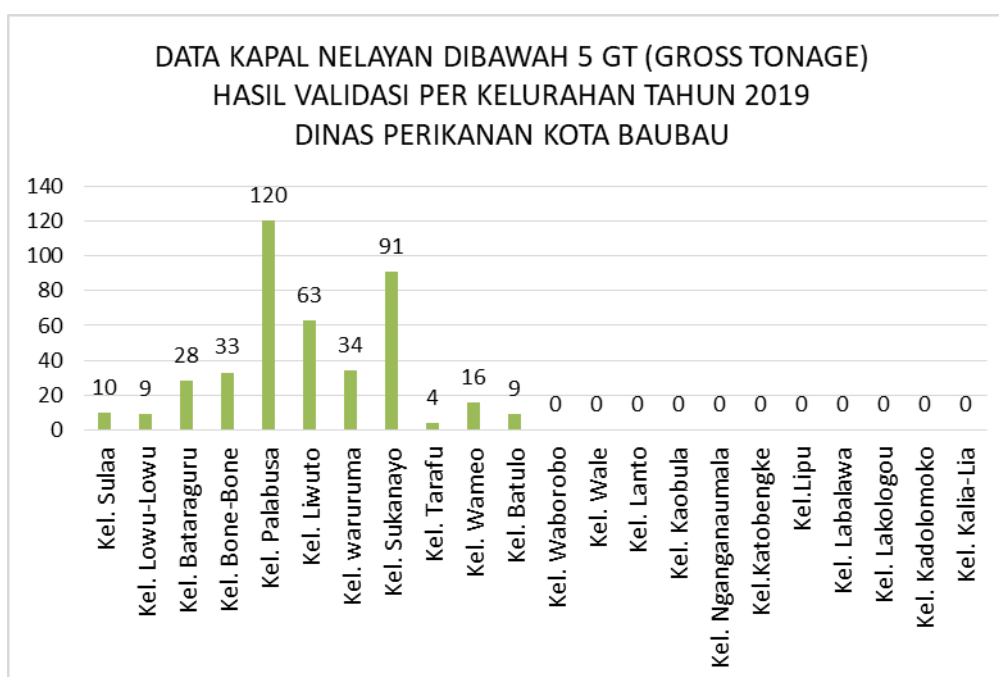
Melalui wawancara yang memuat hal-hal tersebut diatas, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut yaitu dari 6 (enam) orang responden yang diwawancarai, 3 (tiga) orang diantaranya belum mengetahui adanya kewajiban memiliki dokumen kapal perikanan dalam hal ini yaitu BPKP (Bukti Pencatatan Kapal Perikanan) yang menyebabkan setengah dari responden yang diwawancarai belum memiliki dokumen kapal perikanan. Selanjutnya, berkaitan dengan persoalan diatas, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai sosialisasi oleh petugas Dinas Perikanan kota Baubau yang mungkin pernah diikuti oleh keenam responden, hasil yang didapatkan yaitu 3 (tiga) orang diantaranya belum pernah mengikuti sosialisasi mengenai kewajiban kepemilikan dokumen kapal kepada nelayan/pemilik kapal. Selanjutnya, keenam responden memberikan jawaban yang sama yaitu tidak untuk pertanyaan mengenai ada tidaknya himbuan tentang kewajiban dokumen kapal di Pelabuhan Perikanan Kota Baubau. Selanjutnya, diperoleh hasil yang sama dari keenam responden yaitu adanya keinginan dari keenam responden dalam mengikuti undangan sosialisai jika diadakan oleh Dinas Perikanan Kota Baubau. Selain itu, diperoleh kesatuan tanggapan dari keenam responden yang menganggap pentingnya diadakan sosialisasi mengenai pengurusan dokumen

kapal perikanan serta kemauan nelayan dan pemilik kapal dalam mengurus dokumen kapal perikanan apabila mereka telah mengetahui bahwa kepemilikan dokumen izin kapal daerah merupakan suatu kewajiban bagi setiap pemilik kapal perikanan di bawah 5 GT (Gross Tonage).

Sebagai tambahan, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai media yang memungkinkan untuk memberikan sosialisasi mengenai regulasi izin kapal daerah untuk kapal perikanan di bawah 5 GT (Gross Tonage), diperoleh hasil bahwa Televisi dan koran merupakan media yang kurang efektif untuk melakukan sosialisasi bagi keenam responden dan diketahui bahwa sosialisasi berbentuk pertemuan dan diskusi maupun sarasehan merupakan media sosialisasi yang dianggap lebih efektif bagi keenam responden (nelayan dan pemilik kapal) yang telah diwawancarai dalam memberikan pengetahuan mengenai regulasi izin kapal daerah untuk kapal perikanan di bawah 5 GT (Gross Tonage).

Kewenangan penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) merupakan kewenangan Dinas Perikanan, Bidang/Seksi yang menangani kewenangan tersebut adalah Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI dan Seksi Perizinan Usaha Perikanan. Hasil validasi jumlah kapal yang wajib memiliki BPKP sampai dengan tahun 2019 dapat ditampilkan sebagaimana bagan berikut :

Gambar 1.



Berdasarkan tabel diatas, dapat pula diketahui bahwa seksi perizinan usaha perikanan perlu meningkatkan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait kewajiban BPKP, hal ini merujuk pada minimnya jumlah nelayan yang mengurus dokumen BPKP secara mandiri yaitu 8 orang dari total 400 kapal perikanan kota Baubau.

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa implementasi sistem informasi izin kapal daerah terhadap penerbitan izin kapal perikanan dibawah 5 Gross Tonage (GT) di Dinas Perikanan Kota Baubau masih minim dan belum optimal. Hal ini ditandai dengan kurangnya serta minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat nelayan/pemilik kapal perikanan dibawah 5 Gross Tonage (GT) di Kota Baubau melalui seksi Perizinan Usaha Perikanan yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam

pengurusan dokumen kapal perikanan dibawah 5 Gross Tonage (GT) secara mandiri masih sangat minim yakni 8 orang nelayan dari 400 kapal perikanan di bawah 5 Gross Tonage (GT) atau dinyatakan dalam tingkat persentase yaitu sebesar 2 %.

KESIMPULAN

Implementasi sistem informasi izin kapal daerah terhadap penerbitan izin kapal Perikanan dibawah 5 GT (Gross Tonage) di Dinas Perikanan Kota Baubau yaitu a.) Pas Kecil merupakan Tanda Kebangsaan Kapal yang wajib dimiliki oleh nelayan yang mempunyai kapal dibawah 5 Gross Tonage (GT) yang merupakan wewenang Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Baubau dalam penerbitannya. b.) Bukti Pencatatan Kapal Perikanan dibawah 5 Gross Tonage (GT) melalui aplikasi SIMKADA pada Seksi Perizinan Usaha Perikanan. Namun belum optimal ditunjukkan dengan tingkat kesadaran masyarakat nelayan/pemilik kapal daerah dalam pengurusan dokumen kapal perikanan dibawah 5 Gross Tonage (GT) secara mandiri masih sangat rendah yang memiliki tingkat persentase sebesar 2 %.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton S, Mizhar., Mardiyono, dan Wima Yudho Prasetyo. 2008. *Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar (Studi Kasus Pada PPP Tamperan Kab. Pacitan)*. Dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2. No. 11
- Herdiansyah Haris, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kusnadi. 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.
- Lubis, E. 2002., *Pengantar Pelabuhan Perikanan*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Supriadi dan Alimudin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrudin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: PT.Umitoha Ukhuwah Grafika.